

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
19. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RW.210/11/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017; Nomor 954/KMK.07/2017; Nomor 116 Tahun 2018; Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
31. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur penerima Program Bekerja; dan
12. Bupati penerima Program Bekerja.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **19 Juli 2019**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur penerima Program Bekerja; dan
12. Bupati penerima Program Bekerja.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN
PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA
KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Provinsi	Kabupaten	KRPL	RTMP	Pelaksana eselon I	Penanggung Jawab Provinsi	Komoditas
1.	ACEH	Aceh Timur	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Kelapa
		Aceh Pidie	7		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan		Ayam, Kelapa
		Aceh Tengah	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Aceh Barat	7		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

		Aceh Besar	7		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
2.	SUMATERA UTARA	Padang Lawas		4.037	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Ayam, Kelapa
		Simalungun		2.960	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan		Ayam, Kelapa
		Kota Gunungsitoli	6		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Langkat	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Nias Utara	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Serdang Bedagai	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
3.	SUMATERA BARAT	Pasaman		5.900	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat	Direktorat Jenderal Perkebunan	Ayam, Durian, Kakao

					Jenderal Hortikultura		
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Pasaman Barat		4.521	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan		Ayam, Kakao
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kota Solok	6		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Padang Pariaman	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
4.	RIAU	Kampar	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Kelapa
		Rokan Hulu	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Indragiri Hulu	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kuantan Sengingi	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

5.	KEPULAUAN RIAU	Natuna	10		Badan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam
		Bintan	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Karimun	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Anambas	4		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
6.	SUMATERA SELATAN	Muara Enim		2.370	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ayam
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Ogan Komering Ilir		5.906	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Lahat	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		OKU Timur	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		OKU	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

		OKU Selatan	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Musi Rawas Utara	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
7.	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Kelapa
		Kerinci	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		Ayam, Durian, Kopi
		Bungo	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Batanghari	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
8.	BENGKULU	Lebong		3.050	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Ayam
			3		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kaur		3.231	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam

			5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Bengkulu Tengah	3		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kepahiang	3		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Bengkulu Utara	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kota Bengkulu	3		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
9.	LAMPUNG	Lampung Tengah	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Pala
		Tanggamus	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam, Durian, Pala
		Lampung Selatan	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Lampung Timur	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Tulang Bawang	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Way Kanan	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

		Mesuji	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
10.	BANTEN	Lebak		6.580	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura	Direktorat Jenderal Hortikultura	Durian, Kelapa
		Tangerang		3.008	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Serang		3.055	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Pandeglang	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
11.	JAWA BARAT	Karawang		6.235	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Ayam, Durian, kelapa

		Majalengka		4.087	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		Ayam, Durian, kopi
		Cianjur		6.318	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Garut		12.670	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Sukabumi		3.580	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Tasikmalaya		6.224	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Indramayu		8.419	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Bandung		7.230	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Subang		8.034	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam

		Cirebon		4.802	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Ciamis		5.993	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Kuningan		3.275	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Sumedang		3.133	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Bandung	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
12.	D.I. YOGYAKARTA	Bantul	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Kopi
		Kulon Progo	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		Ayam, Durian, Kopi
13.	JAWA TENGAH	Blora		9.953	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ayam, Durian, Kelapa

					Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		
		Grobogan		13.510	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		Ayam, Durian, Kelapa
		Pemalang		3.055	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kebumen		9.369	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Klaten		1.264	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

		Banyumas	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Brebes	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Cilacap	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Demak	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kota Pekalongan	12		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Purbalingga	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Wonosobo	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Tegal		9.805	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Pekalongan		6.580	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Batang		7.412	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
14.	JAWA TIMUR	Probolinggo		1.279	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal Hortikultura	Ayam, Durian, Kopi

					Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		
		Malang		5.229	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		Ayam, Durian, Kopi
		Bangkalan		8.931	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Pamekasan		12.230	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			9		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Nganjuk		12.036	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

		Bondowoso	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Jember	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Kediri	12		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Lamongan	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Sampang	8		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Sumenep	9		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Trenggalek	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Tuban	6		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Situbondo		8.918	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
		Banyuwangi		7.285	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian		Ayam
15.	KALIMANTAN TENGAH	Kapuas	10		Badan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam
		Kotowaringin Timur	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

		Barito Timur	4		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
16.	KALIMANTAN BARAT	Sintang	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Lada
		Sambas	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		Ayam, Durian, Lada
		Ketapang	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
17.	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Bumbu		1.826	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Direktorat Jenderal Perkebunan	Itik, Karet
		Tapin		1.710	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Itik
		Tanah Laut		1.780	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Itik

		Balangan		2.145	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Itik
		Kotabaru		980	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Itik
		Kota Banjarbaru		817	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Itik
		Hulu Sungai Utara		3.823	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Itik
			10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
18.	SULAWESI BARAT	Polewali Mandar		6.062	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ayam
		Majene		2.851	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Mamuju		4.432	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam

		Mamuju Tengah		1.200	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Mamuju Utara		1.473	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Mamasa	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
19.	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	10		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Kelapa
		Banggai	5		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan		Ayam, Kelapa
		Buol	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Toli-Toli	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Donggala	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
20.	SULAWESI TENGGARA	Kolaka		1.415	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat	Direktorat Jenderal Hortikultura	Ayam, Durian, Kakao

					Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura		
		Buton		1.070	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perkebunan		Ayam, Jambu Mete
		Konawe Utara		934	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Konawe Selatan		2.375	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Wakatobi		1.330	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Bombana		1.247	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Buton Selatan		1.558	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam

		Muna	5		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
21.	SULAWESI SELATAN	Luwu Utara		3.327	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ayam
		Luwu Timur		2.213	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Soppeng		2.112	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Sidenreng Rappang		2.886	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Pangkep		5.160	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Wajo		3.284	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Pinrang		3.594	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam

		Maros		2.026	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Takalar		2.228	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Kepulauan Selayar		2.000	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Bone		3.767	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
			15		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
22.	GORONTALO	Gorontalo		5.360	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ayam
		Bualemo		4.816	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Kota Gorontalo		469	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam

		Bone Bolango		1.481	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Gorontalo Utara		2.191	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
		Pohuwatu		1.711	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		Ayam
23.	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Barat	5		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Hortikultura	Badan Ketahanan Pangan	Ayam, Durian, Kelapa
		Lombok Timur	5		Badan Ketahanan Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan		Ayam, Kelapa
		Kota Bima	12		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Dompu	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Sumbawa Barat	13		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

		Lombok Tengah	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Sumbawa	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

		Lombok Tengah	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Sumbawa	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

		Lombok Tengah	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam
		Sumbawa	10		Badan Ketahanan Pangan		Ayam

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN